

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pembangunan nasional serta pemeliharaan stabilitas ekonomi secara fundamental ditopang oleh sektor perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara yang paling utama. Kendati demikian, dari sudut pandang dunia usaha, kontribusi wajib ini justru menggerus profitabilitas bersih yang dapat diperoleh. Kontradiksi kepentingan inilah yang memicu korporasi untuk mengadopsi strategi manajemen pajak, yang diimplementasikan melalui skema perencanaan serta pengendalian yang patuh terhadap regulasi hukum. Melalui tata kelola fiskal yang efisien ini, entitas bisnis dapat mengamankan pencapaian laba setelah pajak secara maksimal. Penelitian Mutia & Hasymi Mhd, (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari strategi keuangan perusahaan dalam mempertahankan kinerja perusahaan.

Tingginya kewajiban perpajakan yang harus ditanggung akibat perolehan laba yang maksimal mendorong entitas bisnis untuk melakukan pengelolaan pajak yang efisien. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), praktik pengelolaan kewajiban perpajakan atau manajemen pajak telah bergeser menjadi salah satu pembahasan utama, khususnya bagi korporasi yang bergerak di industri barang konsumsi primer. Hal ini wajar terjadi mengingat sektor tersebut bergerak dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang menjamin stabilnya permintaan pasar. Stabilitas inilah yang menjadi katalisator tingginya tingkat penjualan dan profitabilitas perusahaan, sehingga menuntut adanya strategi pajak yang optimal agar kinerja operasional korporasi tidak terganggu oleh besarnya beban fiskal.

Fenomena manajemen pajak dapat diamati pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang secara konsisten mencatat kinerja keuangan yang tinggi. Pada tahun 2023, Indofood membukukan laba bersih sebesar sekitar Rp8,14 triliun dengan total aset mencapai Rp186,58 triliun (Rabbi, 2024). Besarnya laba tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban

pajak yang tinggi sehingga diperlukan pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik agar laba perusahaan setelah pajak tetap terjaga. Atas dasar situasi tersebut, besarnya ukuran perusahaan serta tingginya profitabilitas yang diraih cenderung mendorong entitas bisnis untuk menerapkan strategi perencanaan pajak secara lebih terarah dan optimal.

Strategi korporasi dalam memelihara tingkat efisiensi melalui tata kelola kewajiban perpajakan dapat diwujudkan dengan meregulasi pos biaya operasional. Praktik manajemen keuangan semacam ini tercermin dalam rekam jejak kasus PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Kebijakan pelaporan biaya promosi dan iklan perusahaan tersebut sempat memicu atensi dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini wajar terjadi mengingat mekanisme pengelolaan beban tersebut berdampak signifikan terhadap penetapan laba kena pajak, yang pada muaranya memengaruhi kalkulasi total pajak yang harus disetorkan ke kas negara (Retnaningdya & Cahaya, 2021).

Fenomena manajemen pajak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, terutama profitabilitas dan tata kelola. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, profitabilitas diduga berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan (S. Y. Sari & Chairunisa, 2025). Namun demikian, perusahaan juga perlu mempertimbangkan reputasi dan transparansi dalam menjalankan kebijakan perpajakannya agar tetap memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Akan tetapi, efektivitas komisaris independen dalam mengawasi pengelolaan perpajakan perusahaan masih menunjukkan hasil yang belum konsisten dan sering kali terbatas dalam memengaruhi keputusan strategis perusahaan (Esterisa Sabatini Rolinda, 2022). Fakta tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem *corporate governance* yang membuat pengawasan terhadap praktik manajemen pajak belum optimal. Variabel ukuran perusahaan juga

diidentifikasi sebagai faktor determinan dalam skema pengelolaan pajak. Perusahaan berskala besar umumnya didukung oleh kompleksitas operasional, kepemilikan aset, dan sumber daya yang melimpah, sehingga memiliki kapasitas mumpuni untuk menghemat beban fiskal secara efisien (Putri & Kartika, 2025). Namun, besarnya skala usaha ini berbanding lurus dengan tingginya sorotan masyarakat serta tuntutan pemeliharaan citra, yang mengharuskan mereka mengedepankan aspek keterbukaan informasi perpajakan. Pengadopsian laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) bertindak sebagai katalis dalam meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab manajerial, yang turut mencakup tata kelola perpajakan perusahaan. Manifestasi tanggung jawab sosial dalam laporan tersebut berpeluang mengubah pola manajemen pajak korporasi. Oleh sebab itu, pengujian empiris yang mengombinasikan pengaruh profitabilitas, persentase komisaris independen, ukuran perusahaan, dan pelaporan keberlanjutan menjadi urgensi ilmiah dalam mendeteksi perilaku manajemen pajak, terutama pada perusahaan barang konsumsi primer yang melantai di BEI.

Sejumlah literatur empiris yang menguji dampak profitabilitas terhadap manajemen pajak entitas bisnis hingga kini masih menyisakan inkonsistensi temuan. Di satu sisi, Mutia & Hasymi Mhd (2020) membuktikan bahwa kapasitas perolehan keuntungan memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, karena dorongan untuk mengamankan pendapatan bersih pascapajak memicu optimalisasi pengelolaan kewajiban fiskal. Di sisi lain, Devi et al. (2024) memberikan bukti sanggahan yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mutlak memicu aktivitas manajemen pajak akibat adanya pertimbangan lain berupa kepatuhan hukum perpajakan serta stabilitas modal perusahaan. Kontradiksi dari berbagai studi terdahulu ini mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak masih sangat bergantung pada karakteristik sektor korporasi yang diteliti.

Penelitian terdahulu mengenai proporsi komisaris independen terhadap manajemen pajak juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Manzoni et al., (2022) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak karena keberadaan komisaris independen mampu

meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga aktivitas pengelolaan pajak menjadi lebih transparan. Bertolak belakang dengan premis di atas, sejumlah literatur lain mengindikasikan bahwa peran dewan komisaris independen tidak selalu optimal dalam mengontrol arah kebijakan fiskal korporasi. Keterbatasan efektivitas ini disebabkan oleh dominasi jajaran manajemen internal perusahaan yang jauh lebih kuat dalam mengendalikan setiap pengambilan keputusan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen dalam manajemen pajak masih bergantung pada kondisi internal perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan (Hasymi, 2020).

Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Devi *et al.*, (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan besar memiliki sumber daya, aset, dan aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Sementara itu, penelitian Dayanti *et al.*, (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu memengaruhi manajemen pajak secara signifikan karena perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan akibat tingginya pengawasan publik dan risiko reputasi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum dapat dijadikan faktor utama dalam menentukan manajemen pajak perusahaan.

Penelitian terkait *Sustainability Reporting* terhadap manajemen pajak juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Asmara, (2025) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan *Sustainability Reporting* yang tinggi cenderung lebih transparan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. *Sustainability Reporting* dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan perusahaan. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Firmansyah & Lastanti, (2024) menjelaskan bahwa *sustainability report disclosure* tidak

selalu memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan perpajakan perusahaan karena beberapa perusahaan hanya menjadikan *Sustainability Reporting* sebagai bentuk kepatuhan regulasi dan peningkatan citra perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Sustainability Reporting* belum tentu mampu memengaruhi manajemen pajak perusahaan secara signifikan.

Pemilihan *Sustainability Reporting* sebagai variabel moderasi dilandasi oleh kemampuannya dalam menjelaskan dinamika perilaku manajemen pajak suatu korporasi. Dalam literatur perpajakan terkini, praktik keberlanjutan telah menjadi dimensi krusial yang melengkapi faktor internal tradisional, seperti proporsi komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Laporan keberlanjutan bukan semata-mata wujud pelaporan tripartit (ekonomi, lingkungan, sosial), melainkan cerminan integritas dan transparansi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Entitas dengan tingkat keterbukaan yang tinggi pada laporan ini akan menghadapi tekanan ekspektasi yang lebih besar untuk menjalankan bisnis secara etis, tidak terkecuali dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, keberadaan pelaporan keberlanjutan ini diproyeksikan memiliki kapabilitas untuk meredefinisi kekuatan hubungan antara elemen internal perusahaan dengan strategi tata kelola pajaknya.

Fokus utama dari riset ini adalah untuk menganalisis peran *Sustainability Reporting* dalam memoderasi efek yang ditimbulkan oleh profitabilitas, skala korporasi, serta persentase komisaris independen terhadap praktik manajemen pajak. Adapun objek pengamatan dalam studi ini dipusatkan pada emiten sub-sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Urgensi pengujian ini didorong oleh keterbatasan studi terdahulu yang membedah manajemen pajak pada sektor kebutuhan pokok, khususnya untuk periode 2021–2024. Selain keterbatasan konteks waktu, literatur perpajakan saat ini masih diwarnai oleh kesenjangan empiris (*research gap*). Inkonsistensi nyata terlihat pada dampak profitabilitas yang memicu perdebatan hasil antarpeliteli. Polarisasi temuan serupa juga melanda variabel dimensi korporasi serta persentase komisaris

independen, di mana sebagian studi menemukan pengaruh signifikan sementara yang lain mencatat hasil sebaliknya. Terlebih lagi, mayoritas riset terdahulu mengabaikan peran pelaporan keberlanjutan, padahal instrumen tersebut diproyeksikan mampu mengintervensi tingkat transparansi dan akuntabilitas fiskal perusahaan.

Atas dasar argumentasi di atas, kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini ditunjukkan melalui integrasi laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) dalam memoderasi dampak profitabilitas, porsi komisaris independen, dan skala usaha terhadap tata kelola pajak perusahaan. Pengujian interaksi menggunakan variabel *Sustainability Reporting* tergolong masih langka pada berbagai riset manajemen pajak di lingkup domestik. Urgensi empiris studi ini diperkuat dengan membidik emiten sektor barang konsumsi primer; sebuah bidang industri defensif dengan rantai pasok yang luas, namun luput dari perhatian para peneliti perpajakan sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan periode 2021–2024 yang mencerminkan kondisi terbaru pasca pandemi COVID-19 sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih aktual terkait dinamika kinerja perusahaan dan kebijakan perpajakan perusahaan.

Arus utama tujuan riset ini difokuskan untuk membedah dampak ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, serta persentase komisaris independen terhadap praktik pengelolaan pajak. Analisis ini dikaji dengan menempatkan *Sustainability Reporting* sebagai variabel pemoderasi pada berbagai emiten sub-sektor barang konsumsi primer di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang rentang waktu 2021–2024. Melalui temuan empirisnya, studi ini diproyeksikan mampu menyumbang khazanah keilmuan akademis dalam memperluas literatur sosiologi dan akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan integrasi model moderasi yang sejauh ini masih minim dieksplorasi.

Di samping itu, kajian ini membawa urgensi praktis yang signifikan bagi regulator sebagai bahan pertimbangan dalam menata regulasi perpajakan yang lebih tepat sasaran. Bagi korporasi, hasil riset ini dapat memacu eskalasi keterbukaan serta akuntabilitas pada aspek pengelolaan kewajiban fiskal

mereka. Sementara bagi pihak penanam modal (investor), temuan deduktif dari analisis ini mampu menjadi instrumen evaluasi dalam menakar mutu tata kelola internal sekaligus arah kebijakan pengelolaan pajak emiten. Keterlibatan *Sustainability Reporting* dalam model riset ini juga menyuguhkan sudut pandang mutakhir yang mengaitkan komitmen tanggung jawab sosial korporasi dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Atas dasar kompleksitas fenomena tersebut, pelaksanaan studi yang bertajuk “Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak: Analisis Moderasi *Sustainability Reporting* Emiten Sektor Barang Konsumsi Primer Bursa Efek Indonesia” memiliki relevansi dan nilai kepentingan yang sangat mendasar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak emiten sektor barang konsumsi primer periode 2021-2024 ?
- 2) Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak emiten sektor barang konsumsi primer periode 2021-2024?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak emiten sektor barang konsumsi primer periode 2021-2024?
- 4) Apakah *Sustainability Reporting* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak ?
- 5) Apakah *Sustainability Reporting* mampu memoderasi pengaruh proporsi komisaris independent terhadap manajemen pajak ?
- 6) Apakah *Sustainability Reporting* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak ?
- 7) Apakah profitabilitas, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak emiten sektor barang konsumsi primer periode 2021–2024?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh kapabilitas laba, proporsi komisaris independen, dan skala korporasi terhadap manajemen pajak melalui interaksi laporan keberlanjutan selaku variabel pemoderasi. Dalam upaya menangkap pergeseran iklim usaha yang berdampak terhadap orientasi perpajakan serta kinerja keuangan, periode pengamatan dibatasi pada tahun 2021–2024 dengan menyasar emiten sub-sektor barang konsumsi primer di Bursa Efek Indonesia.

Riset ini mengadopsi metode kuantitatif yang mengandalkan data sekunder dari publikasi laporan resmi korporasi. Dari aspek operasionalisasi variabel, daya laba, efektivitas pengawasan internal, dan skala operasional perusahaan ditempatkan sebagai prediktor (variabel independen). Sebaliknya, pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien diposisikan sebagai variabel dependen (manajemen pajak) yang kekuatannya diprediksi akan dimodulasi oleh keberadaan *Sustainability Reporting*.

Studi ini menaruh perhatian besar pada fungsi *Sustainability Reporting* sebagai instrumen keterbukaan korporasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Indikator ini diproyeksikan mampu bertindak sebagai variabel yang mengakselerasi atau justru melemahkan pengaruh berbagai variabel independen terhadap tata kelola pajak. Oleh karena itu, orientasi mendasar dari riset ini tertuju pada pembuktian empiris mengenai interaksi antarvariabel lewat penerapan uji statistik kuantitatif, sehingga tidak mengulas aspek-aspek kualitatif secara mendetail.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan riset ini meliputi:

- 1) Menguji dampak profitabilitas terhadap manajemen perpajakan pada emiten sub-sektor industri barang konsumsi primer yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang kurun waktu 2021–2024.
- 2) Menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap intensitas manajemen pajak korporasi barang konsumsi primer di BEI

dalam rentang tahun 2021–2024.

- 3) Mendeteksi signifikansi ukuran perusahaan terhadap tata kelola beban fiskal emiten barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI untuk periode pengamatan 2021–2024.
- 4) Membuktikan kapabilitas *Sustainability Reporting* sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat atau memperlemah implikasi profitabilitas terhadap manajemen pajak.
- 5) Mengevaluasi peran pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) dalam mengintervensi pengaruh porsi komisaris independen terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.
- 6) Menakar fungsi interaksi *Sustainability Reporting* dalam memoderasi hubungan antara skala operasional perusahaan dan efisiensi manajemen pajak.
- 7) Menginvestigasi kontribusi profitabilitas, susunan komisaris independen, beserta dimensi ukuran usaha secara bersama-sama (simultan) terhadap pengelolaan pajak emiten barang konsumsi primer di BEI pada periode 2021–2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari pelaksanaan studi ini mencakup dimensi teoretis sekaligus aplikatif bagi berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

- 1) Sektor Akademis: Riset ini diproyeksikan mampu menyumbang wawasan baru dalam pengembangan teori di ranah akuntansi fiskal, tata kelola korporasi, serta pelaporan keberlanjutan, khususnya menyangkut stimulan yang memicu aktivitas manajemen pajak. Poin plus lainnya adalah tersedianya bukti empiris mengenai interaksi *Sustainability Reporting* sebagai instrumen moderasi yang mengikat pengaruh profitabilitas, struktur komisaris independen, dan skala aset emiten barang konsumsi primer di BEI.
- 2) Internal Korporasi: Kajian ini dapat menjadi referensi strategis bagi manajemen dalam menata pemenuhan kewajiban pajak secara lebih kredibel, terbuka, dan akuntabel. Temuan yang dihasilkan juga

diharapkan memotivasi entitas bisnis untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang lebih bermutu sebagai wujud tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

- 3) Pihak Investor: Bagi para penanam modal, *output* riset ini menyajikan parameter tambahan untuk membedah performa emiten, terutama dalam mengombinasikan kepatuhan pajak, implementasi tata kelola yang baik, serta transparansi pelaporan non-keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
- 4) Otoritas Fiskal dan Regulator: Hasil studi diharapkan dapat memberikan basis evaluasi bagi institusi pemerintah dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperketat kontrol atas tindakan manajemen pajak perusahaan. Di samping itu, riset ini berperan sebagai pijakan dalam menggalakkan keterbukaan korporat lewat standardisasi pelaporan keberlanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran alur yang terstruktur, alur pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal ini menguraikan fondasi dasar riset yang mencakup latar belakang masalah, rumusan pertanyaan penelitian, target capaian, urgensi manfaat, batasan ruang lingkup, serta peta alur penulisan. Bab ini berfungsi memberikan potret menyeluruh mengenai rencana pengujian profitabilitas, rasio komisaris independen, dan skala usaha terhadap tata kelola fiskal dengan menaruh *Sustainability Reporting* sebagai instrumen antara (moderasi).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teoretis yang relevan untuk membedah variabel kemampuan, struktur komisaris independen, ukuran perusahaan, manajemen perpajakan,

serta pelaporan keberlanjutan. Di samping itu, bagian ini merangkum komparasi studi terdahulu serta peta pemikiran logis yang mendasari perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan rancangan dan pendekatan metodologis yang diterapkan, penentuan populasi serta teknik sampling yang menasar emiten barang konsumsi primer di BEI rentang tahun 2021–2024. Penjelasan juga mencakup klasifikasi instrumen data, prosedur pengumpulan data, operasionalisasi variabel, hingga teknik pengujian statistik untuk membuktikan hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan deskripsi umum mengenai karakteristik objek pengamatan, hasil pengolahan data statistik, serta telaah kritis mengenai interaksi *Sustainability Reporting* dalam memoderasi efek profitabilitas, porsi komisaris independen, dan dimensi perusahaan terhadap kebijakan pajak industri barang konsumsi primer.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab akhir ini menyajikan sintesis berupa kesimpulan dari temuan lapangan, identifikasi keterbatasan selama riset berjalan, implikasi teoretis maupun praktis, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan studi lanjutan maupun pemangku kepentingan terkait.